



2016

# Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK. PIK BPK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti website, e-mail, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2016, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Tahun 2016. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, Februari 2017

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2016</b> .....	4
<b>A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK</b> .....	5
<b>B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	7
<b>C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016</b> .....	9
1. Pelayanan Permintaan Informasi .....	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat .....	13
3. Komplain atas Informasi .....	15
<b>D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b> .....	16
<b>E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	18
<b>F. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	18
<b>LAMPIRAN</b> .....	20
Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .....	21
Lampiran 2: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK.....	22
Lampiran 3: Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016 .....	23
Lampiran 4: Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016 .....	25
Lampiran 5: Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2016.....	39

**RESUME**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2016**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>	<b>Total: 2009</b>
	a) Permintaan informasi	: 1.057
	b) Pengaduan masyarakat	: 951
	c) Komplain atas informasi	: 1
<b>2.</b>	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (524 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait tugas pemeriksaan BPK (551 pengaduan)
	c) Keberatan atas Informasi	: Keberatan atas informasi terkait pelanggaran kode etik di BPK
<b>3.</b>	<b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: 3 permintaan dalam proses
		(1) Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN (2) Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011 (3) Putusan Majelis Kehormatan Kode etik (MKKE) BPK terkait kasus ketua BPK
	b) Pengaduan Masyarakat	: 73 pengaduan dalam proses (terlampir)
	c) Keberatan atas Informasi	: 1 kasus
		(1) Keberatan informasi atas permintaan salinan putusan MKKE dan sidang BPK terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal

## A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan 2 kali uji konsekuensi yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dengan dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen No. 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK. Kemudian, pada akhir tahun 2015,

daftar informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Uji konsekuensi ini kemudian divalidasi bertepatan pada pelaksanaan Rapat PPID BPK Tahun 2016, yang menghasilkan Surat Keputusan Sekjen No. 551 Tahun 2016 tentang Daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**), sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di BPK meliputi 3 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi  
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat  
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK  
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. Website;
2. E-mail;
3. Telepon dan fax;
4. Surat;
5. PO BOX; dan
6. Datang langsung ke PIK.

Sementara itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;

3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

## B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

### 1. Situs web BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK tengah membangun website BPK baru yang lebih inovatif dan informatif.

### 2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, Gedung Arsip BPK, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK terdiri dari:

- Ruang *Front Office*



Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- Ruang Akses Internet



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- Ruang *Back Office*



Berfungsi sebagai tempat diprosesnya permintaan informasi/pengaduan masyarakat kepada satuan kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta maupun yang membawahi pengaduan masyarakat dimaksud, serta sebagai tempat untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi/pengaduan yang masuk melalui e-mail dan kolom pengaduan masyarakat pada website BPK.



- Ruang penerimaan pengaduan masyarakat/demo



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan demonstrasi/pengaduan masyarakat apabila berjumlah lebih dari 5 orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menugaskan 2 (dua) orang petugas PIK dengan dibantu oleh satu orang tenaga PKL.

Selain kedua saluran komunikasi seperti tersebut di atas, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi  
Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK-RI  
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta

2. Melalui telepon: 021-25549000 ext. 3912 dan fax: 021-57950288
3. Melalui e-mail: [ksbhumas@bpk.go.id](mailto:ksbhumas@bpk.go.id)
4. Melalui PO BOX 4330 JKT 10043

Dalam rangka pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada Subbagian Layanan Informasi.

### C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016, jumlah pelayanan informasi publik di BPK, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah pelayanan informasi publik BPK**

<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Jumlah</b>
Permintaan Informasi	1.057
Pengaduan Masyarakat	951
Komplain Atas Informasi	1
<b>Total</b>	<b>2.009</b>

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 1.057 permintaan informasi yang masuk ke BPK, sebanyak 951 pengaduan masyarakat, serta terdapat sebanyak 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

## 1. Pelayanan Permintaan Informasi

### a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2016, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Jenis permintaan informasi**

Jenis Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Berkala	524	50%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	0	0%
Dikecualikan	11	1%
Informasi lain-lain	512	48%
<i>Trash/Sampah</i>	11	1%
<b>Total</b>	<b>1058</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 1058 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 524 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (50%), sebanyak 11 (1%) permintaan merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan, sebanyak 512 (48%) permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada dan sebanyak 11 permintaan merupakan trash/sampah (1%). Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada jenis informasi yang dikecualikan.

Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2016 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar alasan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data Skripsi, thesis, pemberitaan, kajian, bahan telaahan atau penyusunan tugas akhir, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, peliputan, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan serta untuk di jadikan database

Sementara permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang informasi seputar penerimaan CPNS atau lowongan kerja di BPK Tahun 2016, permintaan menjadi narasumber, untuk dapat menerima kunjungan dari berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum

swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 ini, seluruh informasi yang masuk ke BPK dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2016, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK melalui website, e-mail, surat/fax/po box maupun datang langsung ke PIK BPK adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3 Media penyampaian permintaan informasi**

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Website	120	11%
E-mail	348	33%
Surat/fax/PIK	590	56%
<b>Total</b>	<b>1.058</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 1.058 permintaan informasi yang masuk melalui saluran website, e-mail, surat, fax, po box maupun datang langsung melalui PIK BPK. Terdapat sebanyak 120 permintaan yang masuk melalui website BPK atau sebesar 11%, sebanyak 348 permintaan masuk melalui e-mail (33%), serta terdapat sebanyak 590 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax/po box ataupun datang langsung ke PIK BPK (56%). Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK melalui surat.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/fax/po box yang dikirimkan ke PIK atau dengan datang langsung ke PIK BPK.**

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan (3) Topik Lain-Lain, (4) Trash. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK, dengan kategori topik permintaan informasi sebagai berikut:

Pada tahun 2016, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.

**Tabel 4 Topik permintaan informasi**

No.	Topik		Jumlah		Persentase	Pemohon Informasi per Semester II Tahun 2016
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP LK	385	526	48%	524
		LHP Kinerja	13			
		LHP PDTT	39			
		IHPS	82			
		Informasi Publik Lainnya	7			
2	Informasi yang dikecualikan		11		1%	11
3	Lain-lain	Undangan	75	514	50%	512
		Kepegawaian Secara Umum	12			
		Kunjungan	34			
		Penerimaan CPNS/Pembukaan Lowongan	128			
		Magang/PKL	31			
		Klasifikasi Lainnya	234			
4	Trash		11		1%	11
	<b>JUMLAH</b>		<b>1062</b>		<b>100%</b>	<b>1058</b>

Dari total 1.058 permintaan informasi yang masuk berdasarkan jumlah orang pada tahun 2016 melalui saluran website, e-mail, surat/po box/fax maupun datang langsung, menjadi 1062 permintaan informasi berdasarkan topik dengan rincian sebanyak, sebanyak 526 permintaan terkait permintaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 11 permintaan terkait informasi yang dikecualikan, sebanyak 514 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada. Terdapat 11 permintaan yang tidak jelas identitas dan isinya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses tindak lanjut terhadap kesebelas permintaan tersebut. Dan sudah termasuk 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada topik informasi yang dikecualikan.

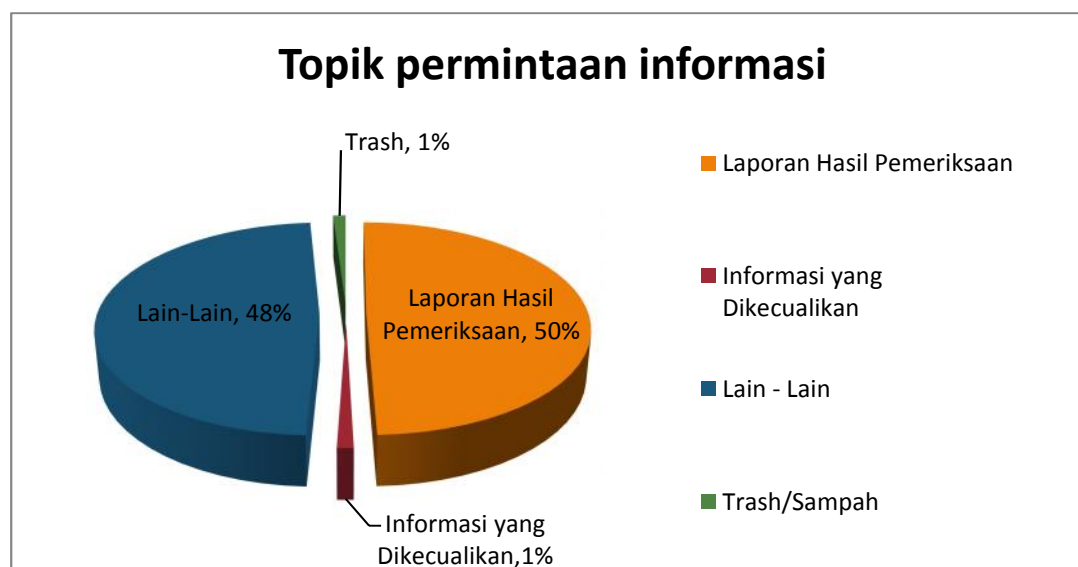
Penjelasan jumlah berdasarkan topik sebanyak 1062 dan berdasarkan jumlah orang yang masuk sebanyak 1058 adalah :

Karena ada permintaan di bulan Februari 2016 atas nama:

1. Nurul Umam Wicaksono pada tanggal 15 Februari 2016 yang meminta, (a) LHP BPK Kinerja Seluruh BUMN TA. 2013 & 2014, (b) LHP BPK PDTT Seluruh BUMN TA. 2013 & 2014;
2. Siti Rahmawati pada tanggal 16 Februari 2016 yang meminta, (a) LHP BPK LKPD Tahun 2012 s.d. 2014 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, (b) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I dan Semester II Tahun 2013 s.d. 2015, (c) Permintaan Informasi terkait data laporan progress pemeriksaan LKPD dan Permintaan Informasi terkait Laporan Profil Entitas, (d) Permintaan Informasi terkait permohonan data ringkasan bezzeting pegawai BPK yang dikategorikan kedalam jenis informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 Ragam topik permintaan informasi kepada BPK



Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (50%) dan topik lain-lain (48%)**.

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2016, dari seluruh permintaan informasi yang masuk, terdapat 1 buah permintaan informasi dan 2 buah permintaan informasi dari tahun 2015 yang masih dalam proses tanggapan oleh satuan kerja terkait di BPK serta 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada topik informasi yang dikecualikan dan sudah masuk dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, statusnya sekarang sudah dalam tahap banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini terus dimonitor agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar permintaan informasi yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

## 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2016, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

**Tabel 5 Media penyampaian pengaduan masyarakat**

Media penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
Website	289	30%
E-mail	98	10%
Surat	550	58%
PIK	14	1%
<b>Total pengaduan</b>	<b>951</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 951 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2016. Terdapat sebanyak 289 pengaduan yang masuk melalui website, sebanyak 98 pengaduan masuk melalui e-mail, sebanyak 550 pengaduan yang masuk melalui surat, serta terdapat sebanyak 14 pengaduan yang disampaikan melalui PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah surat (58%)**.

b. Jenis pengaduan masyarakat

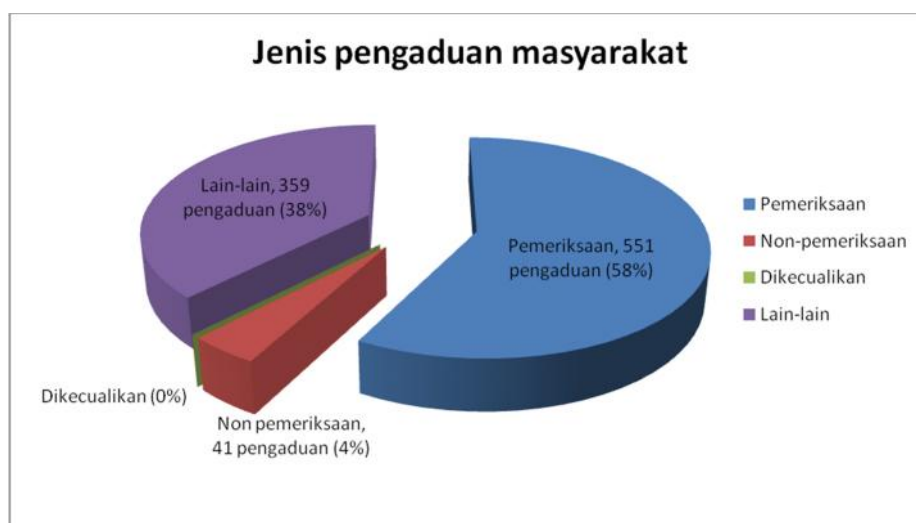
Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2016, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

**Tabel 6 Jenis pengaduan masyarakat**

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Pemeriksaan	551	58%
Non-pemeriksaan	41	4%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	359	38%
<b>Total Pengaduan Masuk</b>	<b>951</b>	<b>100%</b>

Dari total 951 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 551 pengaduan merupakan pengaduan yang terkait dengan permohonan pemeriksaan (58%), baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap entitas tertentu. Sebanyak 41 pengaduan (4%) yang masuk merupakan pengaduan jenis non pemeriksaan. Pengaduan-pengaduan ini terkait dengan laporan dugaan permasalahan kepegawaian BPK, disiplin pegawai BPK, serta permasalahan non pemeriksaan lain pada BPK. Sementara itu, terdapat total 359 pengaduan (38%) yang diterima BPK merupakan pengaduan yang bukan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan BPK menurut undang-undang, sehingga dikategorikan sebagai pengaduan jenis lainnya. **Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas jenis pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK pada tahun 2016 adalah pengaduan masyarakat terkait bidang tugas pemeriksaan BPK.** Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Ragam jenis pengaduan masyarakat



c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 951 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, terdapat 73 pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

### 3. Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2016, terdapat 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK. Keberatan atas informasi tersebut sebagai berikut:

Nama pemohon	: <i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i>
Isi permohonan	: Permintaan informasi berupa salinan putusan MKKE dan sidang BPK terkait kasus Sdr. Efdinal (Surat No. 68/SK/BP/ICW/III/16 tanggal 17 Maret 2016)
Surat keberatan pemohon	: <i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i> menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal BPK selaku PPID BPK Pusat dengan No. 90/SK/BP/ICW/IV/2016 tanggal 8 April 2016 perihal surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik. Surat ditandatangani oleh Sdr. Adnan Topan Husodo selaku Koordinator ICW.
Surat Jawaban BPK	: BPK menyampaikan tanggapan melalui surat Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional selaku PPID BPK (Surat No.

91/S/X.2/04/2016 tanggal 19 April 2016) yang isinya memuat pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf (h) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, PPID bertugas untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses
- c. Berdasarkan hasil uji konsekuensi PPID sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK selaku atasan PPID telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah dokumen/risalah hasil rapat dan Sidang Badan.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka Dokumen atau Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan terkait keputusan dan sanksi bagi pelaksana BPK yang melanggar kode etik merupakan informasi publik yang dikecualikan.

- Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi : Surat dari ICW kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) No.156/SK/BP/ICW/V/16 tanggal 30 Mei 2016 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait permohonan salinan putusan MKKE dan Sidang BPK atas kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal.
- Proses penyelesaian : Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui sidang sengketa informasi publik dengan surat panggilan sidang dari Panitia KIP No. 203/X/KIP-RLS/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dengan register No. 033/V/KIP-PS/2016.

#### **D. SENKETA INFORMASI PUBLIK**

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini berarti bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi khususnya yang masuk pada tahun 2016 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.



Pada tahun 2016, terdapat 1 (satu) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap BPK oleh LSM *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melalui surat Nomor 156/SK//BP/ICW/5/2016, 30 Mei 2016 dengan proses penyelesaian sebagai berikut:

- Nama Pemohon : *Indonesia Corruption Watch* (ICW)
- Pihak Termohon : BPK, yang dalam hal ini diwakili oleh :
1. Akhmad Anang Hernady, S.H.
  2. Herry Riyadi, S.H., M.Si.
  3. Adelina Silalahi, S.E., MBA.
  4. Iwan Fajar Nugroho, S.H., M.H.
  5. Dian Rosdiana, S.H, M.H.
  6. Sandi Indra Prasetya, S.H., LL.M.
  7. Susi Handayani, S.H., M.H.
  8. Victor Hutagaol, S.H.
  9. W.Karana Andika, S.H
  10. Lukman Hakim, S.H.
  11. Niken Wodorini, S.H
  12. Ratna Kusuma Hening, S. IP.
  13. Gilang Gumilar, S.I Kom
- Surat permohonan sengketa informasi : Surat Nomor. 156/SK//BP/ICW/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Surat panggilan sidang sengketa informasi : Surat panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Pusat Nomor. 203/X/KIP-RLS/2016 tanggal 13 Oktober dengan agenda pemeriksaan awal pada 20 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Graha PPI, Lt.5. JL. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat.
- Proses sengketa informasi :
1. Sidang pertama dilaksanakan pada 20 Oktober 2016 dengan agenda pemeriksaan awal.
  2. Sidang kedua dilaksanakan pada 3 November 2016 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan.
  3. Sidang ketiga dilaksanakan pada 10 November 2016 dengan agenda pemeriksaan tertutup.
  4. Sidang keempat dilaksanakan pada 15 November 2016 dengan agenda pemeriksaan lanjutan terbuka.
  5. Sidang kelima dilaksanakan pada 21 November 2016 dengan agenda penyampaian kesimpulan.
  6. Sidang keenam dilaksanakan pada 19 Desember 2016 dengan agenda pembacaan keputusan.

Penyelesaian : Setelah melakukan 6 (enam) kali persidangan, Majelis Hakim Komisioner dari KIP memutuskan bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada pihak pemohon yaitu ICW. Keputusan tersebut diberikan melalui Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 yang memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 033/V/KIP-PS/2016.

Sehubungan dengan putusan KIP tersebut, BPK mengajukan Permohonan Keberatan atas putusan KIP tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Register Perkara Nomor 01/G/KI/2017. Saat ini, BPK masih menunggu hasil keputusan PTUN.

## **E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2016, BPK, dalam hal ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Untuk permintaan informasi yang ditanggapi melalui pos, pemohon informasi tidak mengembalikan tanda terima yang sebenarnya dapat dikirimkan melalui fax atau e-mail ke PIK BPK, sehingga memengaruhi pencatatan pada PIK; serta
3. Banyaknya peminta informasi yang dalam mengisi formulir tidak menyertakan data secara lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk petugas mengklarifikasi data via telpon yang kadang tidak terangkat sehingga BPK dianggap lama dalam menanggapi pengaduan.

## **F. RENCANA TINDAK LANJUT**

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Melaksanakan Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
3. Melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi publik BPK secara rutin khususnya (minimal satu tahun 2 kali) untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK seluruh BPK Perwakilan;
5. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi terutama media sosial;
6. Mempelajari prosedur dan melakukan peninjauan kerja sama dengan APIP terkait penyelesaian pengaduan yang berada di luar tugas dan fungsi serta kewenangan BPK; dan

7. Menyusun *database* pengaduan masyarakat yang diterima BPK baik Pusat dan Perwakilan;
8. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK maupun PPID.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK selama tahun 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

\

**Lampiran 2:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

**Lampiran 3:**

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait  
sampai 31 Desember 2016

## Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016

No.	Tanggal Permintaan	Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Permintaan	Nama Pemohon Informasi	Alamat	Rincian Permintaan Informasi	Deadline	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	15 April 2015	No.479/ND/X.2/4/2015	17 April 2015	Ferry Candra Hasibuan	Jakarta	Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	11 Mei 2015	AKN VII	Masih dalam proses pada Auditorat VII.A
2	27 Oktober 2015	-	-	Yusril Ihza Mahendra	88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt.9 Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Kav.88 Kuningan, Jakarta 12870	Permohonan LHP BPK terhadap Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	19 Nov 2015	Ditama Binbangkum	Masih dalam proses pada Direktorat LPBH (Binbangkum)
3	14 Oktober 2016	1.No.1487/ND/X.2/10/1016 2.No.881/ND/X/10/2016	18 Oktober 2016 19 Oktober 2016	Laode Salama, Agus Sunaryanto, Mujtaba	Kantor IBC, Jalan Pangadegan Selatan VII No.12, RT/RW 008/005, Kel. Pangadegan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 127770	Permintaan Informasi Putusan Majelis Kehormatan Kode etik (MKKE) BPK terkait kasus ketua BPK	8 Nov 2016	Itama	Masih dalam proses pada Sekretariat MKKE (Itama)



**Lampiran 4:**

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait  
sampai 31 Desember 2016

### Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2016

No.	Tanggal Pengaduan	Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Nama Pengadu	Alamat	Rincian Pengaduan	Deadline	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	04 Jan 2016	No.9/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	Masyarakat Sumbar	Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota	Pengaduan terkait kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II di Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat indikasi korupsi dan kolusi pada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II	27 Jan 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
2	04 Jan 2016	No.4/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	Iskandar dan Associates: H. Andi P. Iskandar	Jl. Kusuma Bangsa No. 01 Samarinda	Pengaduan terkait dugaan korupsi pada PT INDO RIDLATAMA POWER (PT IRP), anak perusahaan PT INDONESIA POWER, pada proses pembebasan lahan di RT V, Kelurahan Teluk Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur sejak tahun 2004	27 Jan 2016	AKN VII.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
3	04 Jan 2016	No.3/ND/X.2/01/2016	05 Jan 2016	DPP-LIMIT (LSM)	Jl. Onta Lama No. 95 Makassar, Sulawesi Selatan	Pengaduan terkait belum adanya dasar hukum atas PNBPN yang berasal dari biaya jasa pemeriksaan instalasi calon pelanggan maupun pelanggan PT PLN. Pembentukan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) yang merupakan organisasi pengelola pemeriksaan instalasi listrik di Sulawesi Selatan telah mempolitikasi UU No. 15 Tahun 1985	27 Jan 2016	AKN VII.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
4	17 Feb 2016	No.65/ND/XV III.PDG/02/2016		M. Bistri Batubara	Jl. Ternate, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat	Pengaduan terkait belum selesainya pekerjaan pelebaran jalan nasional Bedeng Rebat (Silaping-Air Batam) di Pasaman Barat sampai dengan berakhirnya kontrak pada 31 Desember 2015 oleh PT. Vende Mestika selaku rekanan	10 Mar 2016	AKN IV	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

5	18 Feb 2016	No.122/ND/X.2.1/2/2015	19 Feb 2016	Rido N. Tutuiha	Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat)	Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan/pembelian tanah dan pelanggaran prosedur serta mekanisme pengadaan tanah pada PPK Tata Usaha BPJN IX Ambon	11 Mar 2016	AKN IV.A	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
6	26 Feb 2016	Tortama KN VI juga sudah mendapatkan surat pengaduan tersebut	-	DPP-PERPISI	Jl. Gongseng Raya No. 6 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur	Pengaduan terkait permohonan pembatalan hasil pemeriksaan BPK Pwk. Sulawesi Tenggara atas LKPD Pemkab. Buton TA 2014 – 2015	22 Mar 2016	AKN VI.B/BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara	Masih dalam proses di Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara
7	10 Maret 2016	No.355/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Pangihutan Siboro		Dugaan penyimpangan dalam distribusi gas di Jakarta dan adanya intimidasi terhadap pengusaha tertentu sehingga meminta untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas Pertamina	13 April 2016	AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Kepala Auditorat VII.A
8	14 Maret 2016	No.358/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Jamal Bakri	Sumsel	Melaporkan adanya dugaan pungutan liar secara terstruktur dan terorganisir di SKPD Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika serta Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu Pematang Panggang Kabupaten OKI Sumatera Selatan	13 April 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat Sumsel I
9	14 Maret 2016	No.380/ND/X.2/3/2016	22 Maret 2016	Syafarudin	Komp. Graha Bumi Khatulistiwa 3, Blok. D, No. 13, Jl. Tabrani Ahmad, Pontianak	Permohonan Audit Investigasi atas SMKN 9 Pelayaran Pontianak	19 April 2016	AKN VI.B	Masih dalam proses di Kasubaud Kalimantan Barat I
10	15 Maret 2016	No.347/ND/X.2/3/2016	16 Maret 2016	Merry Pasaribu	JL. Perintis No.51-Ceger Cipayang Jakarta Timur 13820	Sehubungan dengan penagihan CV. Zihan Putra Sejati pada pekerjaan Pengadaan Penggantian Lantai Vinyl di UGD nomor : PL.01.08/SP/PKPKJK/924/2015 tanggal 11 September 2015 di RS jantung dan Pembuluh darah Harapan Kita, sampai saat ini belum dapat di tagih karena terdapat pengurangan nilai kontrak sebesar Rp. 347.924.000 menjadi Rp. 194.173.000 tanpa adanya adendum kontrak disetujui maupun di tandatangani oleh kedua belah pihak dan meminta BPK agar dapat menindaklanjuti terhadap hal tersebut.	11 April 2016	AKN VI.A	Masih dalam proses di Sub Aud. VI.A.1

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

11	15 Maret 2016	No.331/ND/X.2/3/2016	15 Maret 2016	Hardiman Sinurat	Jl. BB I No. 12, Cipinang Muara, Jakarta Timur, 13420	Mengadukan pemenang tender pembangunan lanjutan kompleks rumah jabatan dan mess BPK Perwakilan Prov. Sumut masuk dalam daftar hitam/blacklist	8 April 2016	Itama	Masih dalam proses di Inspektur PI
12	15 Maret 2016	No.396/ND/X.2/3/2016	16 Maret 2016	Irfan Efendi	JL. Cut Meutia No.52 Kp. Tulaan, Kec. Gunung Meriah-Aceh Singkil	Dugaan Penerimaan Gratifikasi Terhadap Tim Audit BPK-RI Perwakilan Aceh dengan mempertanyakan dengan mudahnya Tim Audit BPK Perwakilan Provinsi Aceh memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	11 April 2016	Itama	Masih dalam proses di Inspektur PI
13	17 Maret 2016	ND No.356/ND/X.2/3/2016	18 Maret 2016	Daniel Minggu	JL. Palem Ratu II No.1, Palem Semi Village, Karawaci-Tangerang 15810	Pengaduan terkait seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2014 di Kab. Mahakam Ulu dalam tes TKB, prosesnya patut diduga cacat hukum, melanggar aturan, tidak sesuai ketentuan. Dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kab. Mahakam Ulu pada Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor dikarenakan proses TKB tersebut tidak dilaksanakan dan di duga menerima uang honorarium.	13 April 2016	AKN VI.B	Masih dalam proses di Sub. Aud. Kaltim II
14	24 Maret 2016	No. 420/ND/X.2/2/2016	30 Maret 2016	Ardiansyah N.	Jl. Rangkayo Pingai Ir. Garuda I RT 25 No. 41 Ruko No. 1 dan 9 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi 39142	Dugaan ketidakwajaran pengelolaan keuangan Yayasan Sahabat yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Disebutkan bahwa Yayasan Sahabat mengelola kegiatan sosial non-profit yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2015 (surat pengaduan dan dokumen terlampir). Pengadu memohon kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Sahabat tersebut.	29 April 2016	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat III.B.1
15	24 Maret 2016	No.396/ND/X.2/3/2016	24 Maret 2016	Semeon Wenda	Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Tengah	Dugaan mafia kasus oleh oknum jaksa pada Kejati Papua dalam kasus pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah	21 April 2016	AKN VI.B	Masih dalam proses di Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Papua

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

16	30 Maret 2016	No.439/ND/X.2/4/2016	31 Maret 2016	Elfrida R. Gultom	Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta	Pengaduan dari Arsyad Arsyad & Co. terkait Permasalahan antara Penghuni Rumah Dinas Ex. PT Djakarta Lloyd dengan PT Karsindo Utama	2 Mei 2016	AKN VII.B	Surat masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat VII.B.1
17	11 April 2016	No.527/ND/X.2/4/2016	13 April 2016	Iskandar Bahsoan	Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo	Laporan terkait dugaan pelanggaran undang-undang ASN dan kode etik oleh oknum pejabat BPK	10 Mei 2016	Inspektorat Utama	Pada Inspektur PI
18	18 April 2016	No.572/ND/X.2/4/2016	27 April 2016	Mahmud Dahiri	Dusun Mamak RT01/04 Desa Mamak, Kecamatan Lopok Sumbawa	Permohonan audit atas pelaksanaan proyek rehabilitasi daerah irigasi Mamak, Kakiang dan Pungkit yang diduga terjadi penyimpangan.	20 Mei 2016	AKN IV	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.A.1
19	26 April 2016	No.605/ND/X.2/4/2016	29 April 2016	Yani Achmadi	Jl. AIS Nasution RT 007 RW 002 Kelurahan Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Kalteng	Pengaduan terkait pernyataan Kuasa Hukum PT. Swa Karya Jaya yang menyebutkan LHP BPK mengenai proyek pembangunan pelabuhan Teluk Segintung penuh rekayasa dan dimuat dalam surat kabar Radar Sampit, sehingga dapat membangun opini yang tidak baik terhadap hasil pemeriksaan BPK	24 Mei 2016	Inspektorat Penegakan Integritas	Surat disiposisikan ke Inspektur Penegakan Integritas (PI)
20	26 April 2016	No.608/ND/X.2/4/2016	29 April 2016	Nur Ahmad		Pengaduan mengenai konfirmasi data dan hasil investigasi DPD-LSM ICON RI di Jawa Timur terkait pembangunan gedung asrama mahasiswa dan lapangan futsal Universitas Negeri Surabaya, yang berdasarkan informasi pihak UNS disebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak ada masalah	24 Mei 2016	AKN III AKN V	Surat masih dalam proses Ka Sub Aud III.C.2
21	28 April 2016	No.666/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Ahmad Rudi	Sumatera Selatan	Pengaduan terkait perayaan ulang tahun Ibu Agung Firman Sampurna yang dihadiri oleh para pejabat di Sumatera Selatan dan memberi hadiah sebagai gratifikasi	7 Juni 2016	Inspektorat Penegakan Integritas	Surat masih dalam proses pada Inspektur PI
22	28 April 2016	No.665/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Andi Khoirul Harahap	Jl. Berlian Simp. Nilam No. 2, Medan	Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh kepala Perwakilan/PPID dan Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7 Juni 2016	AKN V	Masih di Auditorat V.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

23	9 Mei 2016	No.662/ND/X.2/5/2016	13 Mei 2016	Indra Sunandar	Kontraktor renovasi dan pengadaan barang di Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta	Permohonan untuk melakukan pemeriksaan atas Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta	7 Juni 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Bengkulu 1
24	10 Mei 2016	No.736/ND/X.2/5/2016	25 Mei 2016	Toni Gustanto Ratu	Gedung Perintis Kemerdekaan RI, Lt. 5 Utama, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta	Dugaan korupsi atas belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2006 oleh Pejabat dan Bendahara. Pemeriksaan BPK telah menghasilkan temuan pemeriksaan terkait penggunaan dana bantuan sosial tidak sesuai ketentuan	17 Juni 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Riau II
25	10 Mei 2016	No.718/ND/X.2/5/2016	23 Mei 2016	P. Paulinus Sihombing	Jl. Samudra I, No. 200, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Masukan Paulinus Sihombing sebagai Pemegang Kuasa penuh Eigendom Verponding (Koordinator Kelompok Masyarakat Perjuangan Jakarta) atas tanah Batavia (termasuk tanah RS Sumber Waras).	15 Juni 2016	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Kasubaud DKI I,II dan III
26	11 Mei 2016	No.726/ND/X.2/5/2016	24 Mei 2016	Fitri Yanti	Komplek Perumahan Plams Garden Elok, Blok B No. 20 Batam Centre - Batam	Permohonan Penjelasan Hasil Audit BP. Batam	16 Juni 2016	AKN V (Kaud V.A)	Masih dalam proses di Sub. Aud. V.A.2
27	12 Mei 2016	No.682/ND/X.2/5/2016	17 Mei 2016	Sofian Effendi	Komisi Aparatur Sipil Negara Jl. Let. Jend MT. Haryono Kav 52-53 Pancoran, Jakarta)	Permohonan pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh 12 Bupati/Walikota berdasarkan hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara	13 Juni 2016	AKN III.A	Masih dalam proses di Kepala Sub Auditorat III.A.2
28	19 Mei 2016	No.734/ND/X.2/5/2016	25 Mei 2016	Masyarakat Jakarta		Dugaan penyalahgunaan wewenang atas kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Eco Partner Indonesia. Kerjasama ini terindikasi lebih banyak menguntungkan pihak swasta dan melibatkan Sdr. Harry Tjahaja Purnama (adik Gubernur DKI Jakarta).	17 Juni 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud DKI I, II, III
29	25 Mei 2016	No.771/ND/X.2/5/2016	31 Mei 2016	Maharoni	Jl. Singidikane No. 19 Kota Jambi	Permohonan penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Batang Hari	23 Juni 2016		Pada Sub Auditorat IV.B.I

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

30	25 Mei 2016	No.803/ND/X.2/6/2016	8 Juni 2016	Tarkosunaryo	Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	Permohonan masukan terhadap rancangan peraturan OJK tentang tata cara dalam menggunakan jasa akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik bagi lembaga yang diawasi oleh OJK	1 Juli 2016		Masih dalam proses di Kasubdit Litbang Pemeriksaan Keuangan
31	26 Mei 2016	No.751/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Lalu Zulkifli	Direktur Lembaga Bantuan Hukum "Metropolitan" Cabang NTB	Permohonan pemeriksaan atas manajemen ITDC (K.E.K. Mandalika Resort) Pantai Kuta, Nusa Tenggara Barat	21 Juni 2016	AKN VII.B	Surat masih dalam proses di Auditorat VII.B
32	26 Mei 2016	No.753/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Tim Peduli Masyarakat Lembah Baliem		Dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Papua pada beberapa proyek SKPD, dana Otsus TA 2014, dan penyalahgunaan kepemilikan tanah Pemda yang digunakan untuk kepentingan pribadi	21 Juni 2016	AKN VI.B	Masih dalam proses di Kasubaud Papua II
33	26 Mei 2016	No.756/ND/X.2/6/2016	27 Mei 2016	Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP-BPJS)		Permohon pemeriksaan investigatif terkait dugaan penyalahgunaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam distribusi kartu BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 5000 nelayan di Cilacap, 1000 nelayan di Banyuwangi, 1200 pengendara Gojek, dan lain-lain	21 Juni 2016	AKN VI.A	Surat masih dalam proses di Kepala Auditorat VI.A
34	3 Juni 2016	No.820/ND/X.2/6/2016	10 Juni 2016	Slamet Hartonegoro		Laporan pengaduan dari Sdr. Slamet Hartonegoro terkait Dugaan Pelanggaran Proyek Beasiswa INDESO di Kementerian Kelautan dan Perikanan	12 Juli 2016	AKN IV	Surat masih dalam proses di Kasubaud IV.C.2
35	7 Juni 2016	No.827/ND/X.2/6/2016	14 Juni 2016	Bareta Simanjuntak	DK. Pailus RT/RW 007/003, Kel. Karanggondang, Kec Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	Meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan PT. PLN (Persero) dalam pembebasan lahan dan kompensasi terhadap warga bawah jaringan Sutet SUTT 150 KV di Jepara, khususnya di desa Srikandang dan sekitarnya	18 Juli 2016	AKN VII	Surat masih dalam proses pada Auditorat VII.A
36	14 Juni 2016	No.838/ND/X.2/6/2016	16 Juni 2016	Masyugi, M.A (Pengurus Forum Kajian Masyarakat		Laporan dugaan penyimpangan dalam penggunaan belanja tidak terduga pada APBD Kabupaten Jeneponto yang tidak sesuai dengan Pemendagri No. 21 tahun 2011	20 Juli 2016	AKN VI	Masih dalam proses di Sub. Aud. Sulawesi Selatan I dan Kassubag Hukum

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

				Jeneponto)					
37	15 Juni 2016	No.892/ND/X. 2/6/2016	24 Juni 2016	Pestamen Sitohang, Wiraswasta	Jl. Penguin VII Perumnas Mandala, Medan	Permohonan pemeriksaan atas Kantor Regional BPJS Kesehatan Medan	28 Juli 2016	AKN VI.A	Surat masih dalam proses pada Auditorat VI.A
38	15 Juni 2016	No.884/ND/X. 2/6/2016	24 Juni 2016	RD. Herdi, Mahasiswa	Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Unpad, Bandung	Pengaduan atas kejanggalaan struktur organisasi di Inspektorat Kab. Purwakarta	28 Juli 2016	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub. Aud. Jabar II dan III
39	20 Juni 2016	No.885/ND/X. 2/6/2016	24 Juni 2016	R. Wendeilyna S.		Dugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah tahun 2014 yang dilakukan oleh anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012- 2016. Kasus tersebut telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan berharap agar BPK dapat melakukan perhitungan kerugian negara pada kasus tersebut.	28 Juli 2016	AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud DKI I,II,III
40	27 Juni 2016	No.903/ND/X. 2/6/2016	28 Juni 2016	Alfian Pobela		Tembusan pengaduan ditujukan kepada BPK Pwk Prov. Sulut terkait permohonan audit investigasi Yayasan Pembangunan Al-Kautsar (YPAK) Kotamobagu	3 Agustus 2016	AKN V	Surat masih dalam proses pada Auditorat V.A.2
41	29 Juni 2016	No.924/ND/X. 2/6/2016	30 Juni 2016	A.S. Suganda Dentuman Djati, Sekretaris dan Koordinator Badan Pekerja LSM Jaringan Pengawas Pencegahan Korupsi	Sidosermo II D No. 4 Surabaya	Dugaan penyimpangan dan keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Karang Andong – Kesamben Kulon – Perning dengan APBD Kab. Gresik tahun 2015	5 Agustus 2016	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Sub. Aud. Jawa Timur I dan sedang dalam proses diskusi dengan tim LKPD gresik
42	30 Juni 2016	No.940/ND/X. 2/6/2016	12 Juli 2016	Lukmanul Hakim, Pengacara dan sebagai sekjen di Forum	JL. Plapon Raya No.8 RT/RW 006/003, Kayu Puih, Jakarta Timur	Pengaduan tentang Keputusan Gubernur No. 903 Tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tangga Dan Rukun Warga. Keputusan Gubernur ini memuat ketentuan adanya penggunaan Tekhnologi ITE Aplikasi Qlue layanan publik	4 Agustus 2016	AKN V.B	Surat masih dalam proses di Kasubaud DKI I



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

				RT/RW DKI Jakarta		secara cepat, seperti yang dimiliki oleh Jakarta Smart City (Pemprov DKI Jakarta) yang bekerja sama dengan pihak Aplikasi Qlue			
43	26 Juli 2016	No.1008/ND/X.2/7/2016	27 Juli 2016	H. Suparman	Direktur CV. Minag Batuah, Komplek Perumahan Plamo Garden Blok B No. 20, Batam Center, Batam	Tagihan yang belum dibayar karena belum ada keputusan dari BPK RI	22 Agustus 2016	AKN VII.B	Surat didisposisi ke Kepala Subauditorat V.A.1 dan V.A.2
44	5 Agustus 2016	No.1078/ND/X.2/8/2016	8 Agustus 2016	Nanang Joko Prihantono	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bojang, Kab. Tebo, Jambi	Permohonan penjelasan terkait rekomendasi BPK kepada Bupati Tebo	5 Sept 2016	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Jambi (sebagai informasi awal pemeriksaan)
45	8 Agustus 2016	No.1114/ND/X.2/8/2016	11 Agustus 2016	Jonson Manurung	JL. RA. Abusamah No. 2343 Palembang No KTP: 1671073001660005	Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas, Palembang	8 Sept 2016	AKN IV.C	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat IV.C.1
46	9 Agustus 2016	No.1100/ND/X.2/8/2016	10 Agustus 2016	Jonson Manurung	JL. RA. Abusamah No. 2343 Palembang	Permohonan pemeriksaan kinerja terhadap Pokja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	7 Sept 2016	AKN III.C	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat III.B.2
47	10 Agustus 2016	No1140/ND/X.2/8/2016	16 Agustus 2016	Indarjo	Pulung Kencana, RT 01/06, Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung	Dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013 pada SMK Kesehatan Persada Abadi dan meminta BPK melakukan pemeriksaan khusus	16 Sept 2016	AKN VI.A	Surat masih dalam proses di Sub Auditorat VI.A.2
48	12 Agustus 2016			Imam Supriadi	Jl. Camar 6 No.26 Kel. Depok Jaya	Somasi kepada pimpinan BPK dan instansi BPK RI		Inspektorat PI	Pada Inspektorat PI

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

49	15 Agustus 2016	No.1185/ND/X.2/8/2016	29 Agustus 2016	Parulian Panjaitan	Jl. Jambu No. 21, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Dugaan <i>mark-up</i> pada proyek peningkatan berkala Jalan Melanthon Siregar pada Dinas Bina Marga Pengairan Kota Pematang Siantar	22 Sept 2016	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Sumut (sebagai informasi awal pemeriksaan)
50	16 Agustus 2016	No.1157/ND/X.2/8/2016	19 Agustus 2016	Drs. A. Sinambela	Jl. Dongkal No. 65 RT 004/008, Kel. Sukatami, Kec. Tapos, Kotamadya Depok	Pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan <i>tank farm</i> di kawasan industri Sei Mangkei pada APBN TA 2015	13 Sept 2016	AKN II.C	Surat masih dalam proses di Auditorat II.C
51	17 Agustus 2016	No.1153/ND/X.2/8/2016	19 Agustus 2016	Peduli Brebes	n/n	Pengaduan indikasi KKN pada lelang RSUD Bumiayu senilai Rp 8,9 Milyar	13 Sept 2016	AKN V.B	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Kalan Jawa Tengah yang isinya mohon dimanfaatkan sebagai informasi awal dalam pemeriksaan
52	18 Agustus 2016	No.1189/ND/X.2/8/2016	25 Agustus 2016	H. Topik Kopli Ansori S.Pd.	Jl. Raya Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Lebong, Bengkulu	Pengaduan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2016	20 Sept 2016	AKN V.B	Pada Kasubaud Bengkulu II (sebagai bahan pemeriksaan)
53	29 Agustus 2016	No.1257/ND/X.2/8/2016	6 September 2016	MM Khyanta AlFallah	Jl. Sriwijaya Raya No. 653 RT/RW 02/01, Kel. Karya Jaya, Kec. Kertapati, Palembang	Dugaan konspirasi dari suatu kelompok orang yang ditunjuk menjadi pemenang tender di Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Sumatera Selatan APBN TA 2016	30 Sept 2016	AKN IV.A	Masih dalam proses di Kasubaud IV.A.2
54	29 Agustus 2016			Sisi	Yogyakarta	Pengaduan terkait dugaan perselingkuhan pegawai honorer satpam BPK Perwakilan DIY		Biro SDM	Pada Biro SDM

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

55	5 September 2016			Lembaga Independen Bela Rakyat, Perwakilan Kab. Pali Prov. Sumatera Selatan	Jl. Paseban Barat VI No. 15 RT 003/03 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat 10440	Dugaan pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan		AKN V.B	Masih dalam proses di Kasubaud Sumsel 1
56	30 Sept 2016			Andi Bodding	Jl. Masjid Raya No. 24, Cabbenge Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan	Hasil investigasi LSM Sekoci Indoratu berupa indikasi penyalahgunaan anggaran untuk penanganan pasca bencana alam dan kerusakan sosial serta proyek pembangunan Pasar Takalalla		AKN VI	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat VI.B ke Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang isinya untuk ditindaklanjuti
57	6 Okt 2016			Fernando Yohanes (Koordinator Presidium Forum Aktivistis Muda Jakarta)	GG. Pandan I No.33 A, RT/RW 001/006 Kel. Kemanggisan, Kecamatan. Palmerah, Jakarta Barat	Pengaduan indikasi penyimpangan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI. Jakarta dalam pembelian RS. Sumber Waras		AKN V.B	Penyampaian ND dari Ka Aud V.B ke Kepala Perwakilan DKI yang isinya Penyampaian Laporan Pengaduan
58	14 Okt 2016			Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PT Perkebunan Mitra Ogan		Dugaan penyimpangan pada pengelolaan proyek pengembangan kebun di PT Perkebunan Mitra Ogan (Surat nomor: 3/SPPP-SPSI MO/DIR/V/2016 tanggal 30 Mei 2016)		AKN VII.C	Masih dalam proses di Kasubaud VII.C.2

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

				(anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara 3)					
59	18 Okt 2016			Ilyasa Haqqani (Pegawai Swasta PT Telkom Int.)	Jl. Cendana 2 No.24 Jaka Permai Bekasi Barat	Laporan pengaduan tindakan asusila yang dilakukan oleh pegawai BPK yang bernama Achmad Rasyid Maulana		Biro SDM	Masih dalam proses di Bagian Pengembangan Kompetensi
60	7 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1591/ND/X.2/11/2016	8 November 2016	Hari Poernomo, Ketua Umum FKPPB	Jalan Jati Raya Blok M-2, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah	Dugaan Kasus Korupsi Mantan Direktur DPP (Dana Pensiunan Pertamina) Bapak Torang Napitupulu		AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Ka Aud VII.A
61	11 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1639/ND/X.2/11/2016	15 November 2016	Junisab Akbar dan Iskandar Sitorus, Ketua dan Sekretaris Indonesian Audit Watch	Jl. Haji Ten IV No. 6 Jakarta Timur 13210	Pengaduan terkait penggunaan jasa KAP oleh penyidik Kejaksaan di Sumatera Utara untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (permohonan untuk menyikapi perilaku aparat penyidik Kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanpa melalui perhitungan kerugian negara oleh BPK atau pengawas pemerintah/meminta tanggapan BPK, surat LSM Indonesian Audit Watch No. 17/PP/IAW/X/16 tanggal 11 Oktober 2016)		Direktorat KHKKN/D	Direktorat KHKKN/D
62	14 Nov 2016			Wawan Kurniawan, Ex Freelance Konsultan PT.Ganes Engineering Consultant	Kp.Parakantiga RT.014/RW.002, Kelurahan Janggala Tasikmalaya	Pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementerian PUPR SNVT Cimanuk Cisanggarung Sungai Pantai I		AKN IV	Disampaikan kepada Ka. Aud. IV.A untuk ditindaklanjuti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

63	15 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1655/ND/X.2/11/2016	18 November 2016	Agus Rahardjo, Pimpinan KPK	Jl. HR. Rasuna Said, Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan	Penerusan informasi pengaduan masyarakat dari KPK terkait proyek Pembangunan Lanjutan Jembatan dengan konstruksi teknis File Slab Sungai IHI di Jalan Pendang Propinsi Kabupaten Barito Selatan		AKN V.B	Auditorat V.B
64	25 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1711/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Syachmi Adam Ahmad	Dharmahusada Regency No. 622, Surabaya, Jawa Timur	Penyelewengan pembayaran bea masuk impor mesin tenaga gas		AKN VII.A	Surat masih dalam proses di Ka Aud VII.A
65	29 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1703/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Kendy Triana Puspita	Jl. Tadulako, Desa Langaleso, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah	Dugaan Penyimpangan Dana Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Proyek Pelebaran Jalan di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.		AKN VI.B	Auditorat VI.B
66	29 Nov 2016	ND Karo Humas dan KSI No.1702/ND/X.2/11/2016	29 November 2016	Dr. Fransiscus Nanga Roka, Direktur PT Jehova Rafa,	Jalan Barata Jaya XX/15-U, Surabaya	Permohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum atas Auditor BPK Perwakilan NTT		Inspektorat PI	Inspektorat PI
67	2 Des 2016			Ir. Achmad Amr		Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi Pengadaan 5 (lima) Unit Kapal Ikan APBD 2006 pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur		AKN V.B	Auditorat V.B
68	2 Des 2016			Aliansi Corruption Watch	Palembang	Pengaduan terkait Dugaan Penyimpangan adanya Aparatur Sipil Negara yang Tidak Berhak Menerima Tunjangan yang Sah pada Kabupaten Musi Banyuasih, Provinsi Sumatera Selatan		AKN V.B	Auditorat V.B
69	9 Des 2016			Dr. Drh. R. Wendeilyna	Rusinami Green Park View F 203 jl. Daan Mogot Km. 14 Jakarta Barat	Permohonan pembentukan dewan etik untuk audit Komisioner Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2014		AKN V.B	Auditorat V.B
70	13 Des 2016			E.A Fendi Ligaswara, S.Akt	Jl. Kolonel Masturi Km.9, Parompong, Cihideung, Bandung Barat	Dugaan penggelapan dana APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014		AKN V	Auditorat V.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

71	13 Des 2016			Lulu Luqman Hakim	Warung nasi pak Ohim/Belakang Qowwam Community, Bundaran Parakan Muncang, JL. Raya Bypass Bandung-Garut Km.27 No.6 RT/RW 004/003, Kampung Tarikolot, DS. Sindang Pakuwon, Kec. Cimanggung, Kabupaten. Sumedang 45364	Surat pengaduan terkait izin pemanfaatan limbah B3 abu terbang dan abu dasar sisa pembakaran batu bara di desa Cikadongdong, Kecamatan. Singaparna, Kabupaten. Tasikmalaya dari Kementerian Lingkungan Hidup RI nomor 07.50.09 Tahun 2014 atas nama CV. Sonia Persada dari LSM RANCHUNIT.		AKN IV	Auditorat IV.B
72	13 Des 2016			T. Verdi Azwar	Jl. Rembiga 1 Blok L70, Jakarta Pusat 10720	Pengaduan terkait Indikasi Kerugian Keuangan Negara Pembangunan RSUD. Sumalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh		AKN V B	Auditorat V.B
73	21 Des 2016			Eri Wardhana K	Kalibata Pulo, RT/RW 006/005, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	Pengaduan melaporkan penyalahgunaan anggaran PMN untuk PT Merpati Nusantara Air (MNA) dan meminta audiensi dengan Anggota VII BPK terkait permohonan pemeriksaan investigatif atas program RR PT MNA		AKN V	ND kepada Anggota VII BPK ditembuskan kepada Tortama KN VII

**Lampiran 5:**

Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2016